PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN HIV/AIDS DI KABUPATEN CIREBON

Ni'mah Mubarakah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail : mubarakahnimah@gmail.com

Akhmad Khalimy

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail : akhalimy@uinssc.ac.id

Yosep Muhammad Firdaus

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesian

E-mail: yosepfirdaus737@gmail.com

Henrizal Hadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasin, Indonesia

E-mail: henrizal.hadi@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal, di tengah berbagai hambatan sosial dan anggaran yang terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yurisprudensi dengan metode kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga medis, aktivis kesehatan, serta studi dokumen yang mencakup peraturan daerah dan kebijakan pemerintah setempat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dinas Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, seperti edukasi, pemeriksaan rutin, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya, serta perluasan anggaran untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi ODHA.

Kata kunci: *penanggulangan HIV/AIDS; pemerintah daerah; stigma sosial.*

ABSTRACT

This study discusses the role of the government in controlling the spread of HIV/AIDS in Cirebon Regency. The aim of this research is to examine the efforts made by the local government in controlling the spread of HIV/AIDS, as well as identifying the challenges faced in implementing these policies. This research is motivated by the need to understand how local government policies can contribute to HIV/AIDS control at the local level, amidst various social obstacles and budget constraints. The method used in this study is a sociological jurisprudence approach with a qualitative descriptive-analytical method. Data were collected through interviews with local government officials, medical personnel, health activists, as well as document studies related to local regulations and government policies. The findings show that the Cirebon Regency government, through the AIDS Control Commission (KPA), the Health Office, and Non-Governmental Organizations

(NGOs), has implemented various HIV/AIDS prevention and control programs, such as education, routine check-ups, and improving access to health services. However, the main challenges faced are the persistent social stigma towards People with HIV/AIDS (PLWHA) and budget limitations that hinder the effectiveness of the programs. This study concludes that successful HIV/AIDS control requires collaboration between the government, communities, and other relevant sectors, as well as increased budget allocation to improve access and health services for PLWHA.

Keywords: HIV/AIDS control; local government; social stigma.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum dan upaya pemerintah yang ditujukan untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan merupakan landasan untuk mengenali derajat kemanusiaan.¹ Pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia tidak hanya terlihat dari segi fisik, tetapi juga dari segi mental dan sosial.

Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, bekerja dengan produktif, serta menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan merata tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan kesehatan yang adil dan inklusif menjadi elemen penting untuk membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki peluang untuk hidup lebih baik dan penuh harapan. Dengan terpenuhinya hak atas layanan kesehatan, martabat manusia dapat dijaga dan dihormati.

Kesehatan juga termasuk salah satu kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Meski demikian, berbagai tantangan di bidang kesehatan, seperti kasus gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta penyediaan layanan untuk menangani penyakit menular maupun tidak menular, masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Sayangnya, sistem pelaksanaannya sering kali belum memadai. Di antara banyak persoalan kesehatan, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tetap menjadi tantangan signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.²

HIV, atau Human Immunodeficiency Virus, adalah jenis virus yang menyerang sel darah putih bernama sel CD4, yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Akibatnya, virus ini dapat melemahkan sistem imun. Sementara itu, AIDS, atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kondisi yang muncul sebagai dampak dari berkembangnya virus HIV dalam tubuh, sehingga menyebabkan gangguan pada kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit.³

Indonesia terus menghadapi tantangan kesehatan terkait HIV (Human Immunodeficiency Virus), yang membawa dampak sosial yang kompleks. Hingga saat ini, HIV/AIDS tetap menjadi perhatian global, mengingat belum adanya vaksin untuk mencegah virus ini maupun obat yang dapat menyembuhkan epidemi tersebut.

¹Muh Rum Ramadhan Rakhman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Merauke," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017, hlm 21.

²Dandan Haryono And Nurlatipah Nasir, "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (Kpad) Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Di Kota Tasikmalaya" 7 (2021): 466.

³Binov Handitya And Rian Sacıpto "Penanggulangan Dan Pencegahan Hiv Dan Aids Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif Dan Berkesinambungan (Tetep Kober) Di Kabupaten Semarang" 1 (2019): 52.

Mengatasi HIV/AIDS di Indonesia secara efektif dan menyeluruh membutuhkan pendekatan strategis yang melibatkan semua sektor dengan mempertimbangkan faktor struktural. Tantangan ini cukup besar, baik dari sisi geografis maupun sosio-ekonomi. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas, serta sistem pemerintahan desentralisasi yang mencakup 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi. Lebih dari 200 kabupaten di seluruh negeri telah melaporkan kasus HIV, mencerminkan kompleksitas upaya penanggulangan yang diperlukan.

Selama periode Januari hingga Maret, tercatat adanya penurunan jumlah kasus HIV sebanyak 10.376 orang, dengan mayoritas penderitanya berada dalam rentang usia 25-49 tahun (69,6%). Sebanyak 673 orang didiagnosis menderita AIDS, di mana kelompok usia 30-39 tahun mendominasi angka kasus tersebut (38,6%). Secara keseluruhan, jumlah pria yang terinfeksi HIV lebih tinggi dibandingkan wanita, dengan proporsi 66,2% untuk pria dan 33,8% untuk wanita. Sementara itu, kasus AIDS lebih sering ditemukan pada pria (70,9%) dibandingkan wanita (28,7%). Di Jawa Barat, dilaporkan 731 kematian akibat AIDS. Hingga Maret 2017, sebanyak 79.833 pengidap HIV/AIDS telah mendapatkan terapi ARV di Indonesia. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.⁴

Jumlah pengidap HIV/AIDS yg sudah dihasilkan hanya sebagian kecil menurut perkara yang ada, lantaran yang nampak hanyalah bagian atas belaka tetapi sesungguhnya jauh lebih besar daripada perkara yang nampak, terjadi seperti apa yg diklaim “Fenomena Gunung Es”. Selain itu diyakini masih ada liputan yg lebih besar tetapi belum terungkap.⁵

Epidemi HIV/AIDS menjadi tantangan nyata yang kini dihadapi di seluruh wilayah Indonesia. Penyebarannya bersifat dinamis, terus berubah, dan tidak mudah untuk diprediksi arahnya. Masalah ini tergolong serius karena HIV/AIDS dapat dengan mudah menyebar, baik dari sisi geografis maupun sosial, tanpa pola yang tetap. Mobilitas manusia yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mencerminkan pola penyebaran HIV/AIDS di seluruh dunia. Sejak pertama kali ditemukan, AIDS telah menjangkau hampir semua negara. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis yang melibatkan banyak pihak untuk menghentikan dan mengatasi penyebaran virus ini.⁶

Pemerintah telah mengimplementasikan Universal Health Coverage (UHC) dengan memperkenalkan sistem jaminan sosial nasional di sektor kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penderita HIV/AIDS, memiliki akses terhadap layanan asuransi kesehatan. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, budaya, agama, atau status sosial ekonomi, diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan dan fasilitas publik yang komprehensif, berkualitas tinggi, serta bebas dari diskriminasi dan prasangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Terlebih lagi, penyebaran HIV dalam skala besar dan virus ini yang bersifat permanen telah menciptakan ketakutan dalam kehidupan masyarakat. Namun kenyataannya, ketakutan dalam kehidupan masyarakat seringkali tidak berdasar. Ketakutan ini seringkali menimbulkan asumsi,

⁴Rianti Kesumawati, Kusman Ibrahim, and Witdiawati Witdiawati, “Literasi Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS,” *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia* 5, no. 1 (June 26, 2019), <https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.15533>.

⁵Gusti Ayu Marhaeni, M Choirul Hadi, and Ni Wayan Armini, “Intervensi Penyuluhan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Hiv-Aids Di Sma 1 Sidemen Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 6, no. 1 (March 2, 2016): 1–8, <https://doi.org/10.22435/kespro.v6i1.4753.1-8>.

⁶Diyan Purnomo, Mochammad Saleh Soeaidy, and Minto Hadi, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang),” n.d.

⁷Aris Prio Agus Santoso et al., “Hak Reproduksi Pada Penderita Hi/Aids Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 3 (July 4, 2023): hlm 2004, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5130>.

stereotip, dan prasangka negatif terhadap para penyintas HIV/AIDS, atau yang kemudian disebut dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).⁸

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam permasalahan di daerahnya termasuk juga dalam bidang layanan kesehatan. Salah satu isu yang muncul dalam masalah kesehatan saat ini yang terjadi di Cirebon adalah meningkatnya dinamika penyebaran kasus HIV/AIDS.

Adapun jumlah ODHA di kabupaten Cirebon sesuai data yang diperoleh pada tahun 2023 tidak seluruhnya disumbang warga yang ber-KTP Kabupaten Cirebon. Beberapa diantaranya adalah warga daerah lain yang mana memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Cirebon.⁹

Kasus HIV/AIDS di kabupaten Cirebon didominasi oleh hubungan seksual, baik sesama jenis maupun heteroseksual. Laki-laki mendominasi yang terinfeksi. Isu ini telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat, dalam memberikan strategi khusus penanggulangan HIV/AIDS.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Cirebon dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS serta hambatan dan tantangannya dalam pelaksanaan upaya tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yurisprudensi, yang mengintegrasikan aspek hukum dengan realitas sosial di masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS, sekaligus melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks sosial tertentu. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial.¹¹ dengan pendekatan deskriptif analitis.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti.¹² Sedangkan data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹³ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, tenaga medis, dan aktivis kesehatan, yang diambil dari artikel surat kabar. Data sekunder meliputi studi dokumen, seperti peraturan daerah (Perda), kebijakan pemerintah daerah, laporan tahunan, mengenai epidemi HIV/AIDS.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon

Selaras dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menangani berbagai permasalahan masyarakat, termasuk masalah kesehatan. Hal

⁸Mumtaz Afridah et al., "Penerapan Konseling Rebt Untuk Meningkatkan Hardiness Penyintas Hiv/Aids," n.d.

⁹Devteo Mahardika, "Dinkes Cirebon Temukan 312 Kasus Baru HIV/AIDS Sepanjang 2023," 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7066630/dinkes-cirebon-temukan-312-kasus-baru-hiv-aids-sepanjang-2023>.

¹⁰Zulfi Diane Zaeni, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," PRANATA HUKUM 6 (2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.

¹¹Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," Makara Sosial Humaniora 9 (n.d.), <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

¹²Trisna Rukhmana, "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

¹³Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2nd ed. (PT RajaGrafindo Persada, 2013).

ini dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah yang disesuaikan dengan ruang kebijakan pembangunan guna menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain itu, Pasal 2(2) juga mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengacu pada Pasal 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007, partisipasi pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mendukung upaya ini.¹⁴ tentang Pedoman Umum Pembentukan Komite Pengendalian AIDS dan Komite Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten/Kota, dibentuklah Komite Pengendalian AIDS Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komite Pengendalian AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah menunjukkan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi HIV/AIDS melalui peran aktif kepemimpinan lokal. Peraturan ini mengatur struktur organisasi di tingkat daerah, kabupaten, dan kota, serta menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup pengelolaan sumber pendanaan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di wilayah setempat.¹⁵ Untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah, KPAN melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nomor 59 Tahun 2007 sebagai landasan rencana tersebut. dan pengelolaan anggaran. Pada tahun 2007, pertemuan mulai membahas pelaksanaan anggaran. Dampaknya, pendanaan dari sumber pemerintah meningkat dari 22,37% pada tahun 2004 menjadi 39,03% pada tahun 2008.

Epidemi HIV/AIDS adalah permasalahan yang sedang dihadapi daerah-daerah di Indonesia termasuk juga didalamnya adalah Kabupaten Cirebon, Data dari Januari hingga Oktober 2024 menunjukkan terdapat 397 kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon. Angka ini menambah total kumulatif kasus sejak 2000 menjadi 3.665 kasus, dengan peningkatan rata-rata 151 kasus per tahunnya.¹⁶

Di Kabupaten Cirebon, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya penyakit menular ini, dan jumlah pengidap HIV/AIDS pun semakin meningkat. Faktor lain penularan penyakit ini adalah seringnya tindakan dan kegiatan yang mengarah pada HIV/AIDS, seperti seks bebas dan penggunaan narkoba secara bersamaan dengan jarum suntik.¹⁷

Sejalannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang tugas dan wewenang pejabat kesehatan daerah di bidang penanggulangan penyakit menular.¹⁸

Untuk itu, Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengambil peran dan strategi dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS yang semakin menjulak melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan instansi lain untuk bersama-sama menaggulangi penyebaran HIV/AIDS.

2. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Kebijakan Penanggulangan HIV & AIDS di Kabupaten Cirebon

a. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cirebon

¹⁴ "Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007," n.d.

¹⁵Fk Ugm, *Kajian Dokumen Kebijakan Hiv-Aids Dan Sistem Kesehatan Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM), 2015).

¹⁶"Upaya Pemkab Cirebon Dalam Pengendalian HIV/AIDS," 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7667366/upaya-pemkab-cirebon-dalam-pengendalian-hiv-aids/amp>.

¹⁷"49 Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Sudah Bisa Layani Pengidap HIV-AIDS.," *Cirebon Bagus.Id*, 2020, <https://cirebonbagus.id/49-puskesmas-di-kabupaten-cirebon-sudah-bisa-layani-pengidap-hiv-aids/>.

¹⁸"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014," n.d.

Berdasarkan peraturan daerah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Cirebon dibentuk sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam pengendalian, pemantauan, dan pencegahan HIV/AIDS di wilayah tersebut. KPA bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS, sekaligus memastikan adanya koordinasi yang baik di antara berbagai pihak terkait.

Komite ini memegang peran penting dalam menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS, baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun memberikan edukasi mengenai risiko dan bahaya penyakit tersebut. Selain itu, KPA bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan organisasi masyarakat (LSM), untuk mendukung keberhasilan program-program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Melalui kolaborasi yang solid antara KPA, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan upaya pengendalian HIV/AIDS dapat lebih efektif. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pengurangan stigma sosial yang sering kali menjadi hambatan bagi penderita HIV/AIDS.¹⁹

b. Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan kesehatan di tingkat kabupaten atau kota, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.²⁰ Sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki peran utama dalam mengoordinasikan dan melaksanakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tugas tersebut mencakup upaya pencegahan, pengobatan, serta penyediaan berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, Dinas Kesehatan juga berperan dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayahnya berfungsi optimal dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Dengan tanggung jawab yang signifikan ini, Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota menjadi ujung tombak dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerahnya.²¹

Dinas Kesehatan (DinKes) Kabupaten Cirebon fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit, termasuk HIV/AIDS. Salah satu langkah utama yang diambil adalah memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan program-program pencegahan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) yang ada. Saat ini, Kabupaten Cirebon memiliki 72 faskes, yang terdiri dari 60 puskesmas, 11 rumah sakit, dan satu layanan khusus di lembaga kemasyarakatan.

Dengan fasilitas-fasilitas ini, DinKes berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan deteksi dini penyakit dan mencegah penyebaran penyakit menular. Kehadiran faskes ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak individu, terutama yang berisiko tinggi, sehingga mereka dapat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan perawatan yang tepat dan cepat.

Dalam dunia kesehatan belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV, akan tetapi dalam penanggannya telah ditemukan obat yang bisa menekan perkembangbiakan jumlah virus di dalam tubuh hingga menjadi AIDS. Terapi ini disebut Antiretroviral therapy (ART).²²

¹⁹Purnomo, Dyan, Mochammad Saleh Soeaidy, "Analisis Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang)."

²⁰M Suharni et al., *Integrasi Upaya Penanggulangan HIV Dan Aids Kedalam Sistem Kesehatan*, 1st ed. (Yogyakarta: PKMK FK UGM, 2015).

²¹"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016," n.d.

²²Asriyanti Rosmalina and Dedi Kurnaedi, "Pendampingan Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS Oleh Kelompok Dukungan Sebaya Pakungwati Kota Cirebon." *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6650>.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak hanya fokus pada pengobatan tetapi juga merancang berbagai program pencegahan, seperti pemeriksaan HIV/AIDS bagi pasangan calon pengantin serta ibu hamil dan janin sebagai upaya deteksi dini. Program ini bertujuan mengidentifikasi risiko penularan HIV sejak awal sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil secara optimal.

Selain itu, pendekatan psikologis menjadi aspek penting dalam mendorong masyarakat, terutama mereka yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi hambatan berupa rasa takut, malu, atau stigma yang kerap menghalangi individu untuk melakukan pemeriksaan atau menerima perawatan yang diperlukan.²³ Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, diharapkan lebih banyak orang dapat mengakses layanan kesehatan tanpa rasa khawatir atau dihakimi, sehingga pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV/AIDS dapat lebih optimal.

c. Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat

Penyebaran HIV/AIDS di kalangan komunitas gay dan LGBT, khususnya pada usia produktif, menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Meskipun tidak ada data yang terperinci mengenai lokasi spesifik keberadaan komunitas gay,²⁴ deteksi dini terhadap penyebaran HIV/AIDS memiliki peran yang sangat penting. Untuk mendukung hal ini, pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi sebagai mitra dalam membantu komunitas gay atau LGBT mendapatkan akses layanan kesehatan. LSM memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada kelompok rentan terhadap penularan HIV.

Mereka secara aktif mengarahkan individu yang berisiko untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas medis, seperti puskesmas dan rumah sakit. Melalui pendekatan ini, kasus-kasus HIV/AIDS dapat teridentifikasi lebih awal, memungkinkan penanganan lebih cepat dan upaya pencegahan penularan lebih lanjut. Pendekatan berbasis komunitas ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap penderita HIV/AIDS sekaligus memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan oleh mereka.

3. Hambatan dalam Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

Menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Cirebon, pastinya memiliki hambatan yang kompleks seperti pada kasus lain yang sama, salah satunya karena ketidakpedulian masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS selama ini

Peningkatan jumlah kasus ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Salah satunya dari segi kesehatan. Infeksi HIV dan AIDS tidak menunjukkan gejala yang berlangsung selama 7 sampai 10 tahun. Orang yang terinfeksi mungkin kelihatannya orang yang sehat, namun mereka sudah memiliki HIV di dalam tubuhnya dan dapat menularkan virus kepada orang lain dan mereka yang belum menunjukkan gejala penyakit tersebut. Oleh karena itu, orang yang melakukan perilaku berisiko tanpa disadari menularkan virus kepada orang lain, termasuk pasangannya.²⁵

Menurut laman Kementerian Sosial, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS, di antaranya:

²³iwan junaedi, "72 Faskes Di Cirebon Siap Melayani Pemeriksaan HIV-AIDS," *Kabar Cirebon*, 2024, <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2938836522/72-faskes-di-cirebon-siap-melayani-pemeriksaan-hiv-aids?page=all>.

²⁴ "Hambatan Mendeteksi HIV/AIDS Di Kabupaten Cirebon," *Tegar.Id.*, n.d., <https://www.tagar.id/hambatan-mendeteksi-hivaids-di-kabupaten-cirebon>.

²⁵"Strategi Pemerintah Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS," in *BBH Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/strategi-pemerintah-menanggulangi-penyebaran-hiv-aids-lt507e9117c8248/>.

1. Ketakutan akan stigma dan diskriminasi menjadi kendala utama dalam penanganan HIV/AIDS.
2. Stigma terhadap HIV/AIDS masih sering dikaitkan dengan isu-isu seputar perilaku seksual.

Upaya memerangi HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup isu hak asasi manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah keberadaan stigma dan diskriminasi yang masih sangat kuat di tengah masyarakat. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS.²⁶ Banyak orang yang hidup dengan HIV/AIDS sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil, yang menghambat mereka dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Stigma sosial ini menumbuhkan rasa takut dan malu, sehingga banyak individu enggan untuk memeriksakan diri atau menjalani pengobatan. Hal ini memperburuk kondisi dan memperlambat upaya dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, selain intervensi medis, sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam akses layanan kesehatan dan menghapus stigma serta diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS, agar mereka dapat menerima perawatan dengan nyaman tanpa takut atau merasa dihakimi.

Di Kabupaten Cirebon, salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan HIV/AIDS adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan LSM berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS, anggaran yang ada saat ini masih terbatas dan belum cukup untuk mendukung program secara maksimal.²⁷ Hal ini terjadi karena anggaran yang ada harus dibagi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan infrastruktur. Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk program pencegahan HIV/AIDS menjadi terbatas, yang menghambat upaya-upaya edukasi, sosialisasi, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi mereka yang berisiko terinfeksi HIV.

4. Rekomendasi Penulis

Peningkatan Kesadaran: Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu merancang kebijakan yang lebih aktif dan sistematis untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya menghapus stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hingga saat ini, stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS masih menjadi hambatan besar dalam upaya pemberantasan HIV/AIDS, dengan banyak orang yang masih memandang HIV/AIDS secara negatif atau bahkan mengucilkan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meluncurkan program edukasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh untuk merubah pandangan masyarakat tentang HIV/AIDS. Program ini harus menekankan pemahaman bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang dapat diobati, dan ODHA berhak menerima perawatan serta perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi. Salah satu cara yang efektif untuk melakukannya adalah melalui media massa, baik media cetak, elektronik, maupun platform digital yang dapat menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, kampanye juga harus lebih diperkuat di sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan berbagai komunitas masyarakat. Di sekolah-sekolah, misalnya, dapat diadakan sesi khusus yang mengajarkan tentang pentingnya menghindari stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, serta pengetahuan tentang pencegahan HIV/AIDS yang benar. Tempat ibadah juga bisa menjadi pusat penyuluhan yang tepat, karena di sini seringkali terbangun ikatan sosial yang kuat. Dengan menggandeng tokoh agama yang berperan dalam memberikan

²⁶lilis sri. hamdayani, "Kasus HIV Di Cirebon Meningkat, Jumlahnya Capai Ribuan.," *Rejabar*, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/so5meb512/kasus-hiv-di-cirebon-meningkat-jumlahnya-capai-ribuan>.

²⁷"HIV/AIDS Mengancam, Sekda Kabupaten Cirebon: Perda Penanganan Urgent Diwujudkan," 2024, <https://www.kacenews.id/2024/02/20/hiv-aids-mengancam-sekda-kabupaten-cirebon-perda-penanganan-urgent-diwujudkan/>.

pesan positif tentang penerimaan terhadap ODHA, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah menerima perubahan perspektif. Melalui kampanye yang dilaksanakan secara terus-menerus dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, stigma terhadap ODHA dapat diminimalisir, dan upaya penanggulangan HIV/AIDS akan lebih efektif karena masyarakat menjadi lebih terbuka dan mendukung ODHA dalam mendapatkan perawatan dan akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Strategi kolaborasi: Pemerintah Kabupaten Cirebon harus melibatkan lebih banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta komunitas lokal dalam memperluas akses layanan kesehatan untuk ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka. LSM memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS dan memberikan dukungan langsung kepada ODHA, terutama dalam hal akses perawatan medis, sosial, dan psikososial. Kolaborasi antara pemerintah dan LSM sangat penting untuk menyebarkan informasi yang benar tentang HIV/AIDS, menghilangkan mitos yang beredar, dan memberikan bantuan kepada ODHA yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan secara mandiri.

LSM juga dapat berperan dalam mendukung upaya pencegahan HIV/AIDS, seperti mengadakan penyuluhan di tingkat komunitas, serta menyediakan ruang bagi ODHA untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional. Selain itu, komunitas lokal, termasuk kelompok rentan seperti LGBT, pekerja seks, dan pengguna narkoba, juga perlu dilibatkan dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Masyarakat setempat sering kali memiliki wawasan yang lebih dalam mengenai kondisi lokal dan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada individu berisiko tinggi terinfeksi HIV.

Dengan melibatkan LSM dan komunitas lokal dalam setiap langkah program kesehatan, pemerintah dapat memperluas cakupan layanan kesehatan dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih terbuka serta ramah bagi ODHA. Dalam suasana yang inklusif dan bebas diskriminasi ini, ODHA akan merasa lebih dihargai dan didukung, yang akhirnya akan mendorong mereka untuk lebih aktif menjaga kesehatan mereka dan berpartisipasi dalam program pencegahan serta pengobatan yang tersedia.

Peningkatan Pendanaan: Salah satu hambatan utama dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Cirebon telah bekerja sama dengan berbagai pihak, alokasi dana yang terbatas menghambat program edukasi, sosialisasi, dan penguatan fasilitas kesehatan. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang memprioritaskan peningkatan anggaran khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS. Pemerintah daerah harus mengusulkan anggaran yang lebih besar melalui APBD dengan mempertimbangkan besarnya kasus HIV/AIDS yang terus meningkat.

D. KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai inisiatif, seperti kebijakan, pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan peningkatan fasilitas kesehatan, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan dan pencegahan lanjutan. Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di wilayah ini, yang dipengaruhi oleh perilaku seksual berisiko dan penggunaan narkoba, memerlukan perhatian lebih dalam hal deteksi dini, pemeriksaan rutin, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) menjadi hambatan utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia sangat diperlukan untuk memastikan setiap individu menerima perawatan tanpa adanya rasa takut atau malu. Di samping itu, meskipun

terdapat kerjasama antara pemerintah daerah, KPA, LSM, dan sektor kesehatan, keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama dalam memperkuat program pencegahan dan sosialisasi tentang HIV/AIDS.

Karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memperkuat koordinasi antar pihak terkait, meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, serta memperbesar anggaran yang tersedia untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat mengurangi penyebaran HIV/AIDS, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok berisiko tinggi, dan memperluas kesadaran sosial untuk menghilangkan stigma serta diskriminasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridah, Mumtaz, Dhiya Hisanah Riady, Muayyadul Fikri, and Nuraisyah Suryaningrat. "PENERAPAN KONSELING REBT UNTUK MENINGKATKAN HARDINESS PENYINTAS HIV/AIDS," 2 (n.d.).
- cirebon bagus.id*. "49 Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Sudah Bisa Layani Pengidap HIV-AIDS." 2020. <https://cirebonbagus.id/49-puskesmas-di-kabupaten-cirebon-sudah-bisa-layani-pengidap-hiv-aids/>.
- devteo, Mahardika. "Dinkes Cirebon Temukan 312 Kasus Baru HIV/AIDS Sepanjang 2023." *Detik.Com*, 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7066630/dinkes-cirebon-temukan-312-kasus-baru-hiv-aids-sepanjang-2023>.
- hamdayani, lilis sri. "Kasus HIV Di Cirebon Meningkat, Jumlahnya Capai Ribuan." *Rejabar*, 2024. <https://rejabar.republika.co.id/berita/so5meb512/kasus-hiv-di-cirebon-meningkat-jumlahnya-capai-ribuan>.
- Handitya, Binov, and Rian Sacipto. "Penanggulangan Dan Pencegahan Hiv Dan Aids Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif Dan Berkesinambungan (Tetep Kober) Di Kabupaten Semarang" 1 (2019).
- Haryono, Dandan, and Nurlatipah Nasir. "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (Kpad) Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/ Aids Di Kota Tasikmalaya" 7 (2021).
- "HIV/AIDS Mengancam, Sekda Kabupaten Cirebon: Perda Penanganan Urgent Diwujudkan." 2024. <https://www.kacenews.id/2024/02/20/hiv-aids-mengancam-sekda-kabupaten-cirebon-perda-penanganan-urgent-diwujudkan/>.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. 2nd ed. PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- junaedi, iwan. "72 Faskes Di Cirebon Siap Melayani Pemeriksaan HIV-AIDS." *Kabar Cirebon*, 2024. <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2938836522/72-faskes-di-cirebon-siap-melayani-pemeriksaan-hiv-aids?page=all>.
- Kesumawati, Rianti, Kusman Ibrahim, and Witdiawati Witdiawati. "Literasi Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS." *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpki.v5i1.15533>.
- Marhaeni, Gusti Ayu, M Choirul Hadi, and Ni Wayan Armini. "Intervensi Penyuluhan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Hiv-Aids Di Sma 1 Sidemen Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali." *Jurnal Kesehatan*, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.22435/kespro.v6i1.4753.1-8>.

- “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016,” n.d.
- “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014,” n.d.
- Purnomo, Diyan, Mochammad Saleh Soeaidy, and Minto Hadi. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang)” 2 (n.d.).
- Rakhman, Muh Rum Ramadhan. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan HIV-AIDS Di Kabupaten Merauke.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017.
- Rosmalina, Asriyanti, and Dedi Kurnaedi. “Pendampingan Terhadap Orang Dengan HIV/ AIDS Oleh Kelompok Dukungan Sebaya Pakungwati Kota Cirebon.” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 35. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6650>.
- Rukhmana, Trisna. “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.
- Santoso, Aris Prio Agus, Muhamad Habib, Kresna Agung Yudhianto, and Tri Indah Lestari. “Hak Reproduksi Pada Penderita Hiv/Aids Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Dan Agama.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5130>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Sosial Humaniora* 9 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- “Strategi Pemerintah Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS.” In *BBH Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/strategi-pemerintah-menanggulangi-penyebaran-hiv-aids-lt507e9117c8248/>.
- Suharni, M, Hersumpna, chrysant Lily, Perwira Ita, Iko Safika, Ignatios Praporaharjo, satiti, Swasti Sempulur, and Dewi Eviana Hampsari. *Integrasi Upaya Penanggulangan HIV Dan Aids Kedalam Sistem Kesehatan*. 1st ed. Yogyakarta: PKMK FK UGM, 2015.
- Tegar.id*. “Hambatan Mendeteksi HIV/AIDS Di Kabupaten Cirebon.” n.d. <https://www.tagar.id/hambatan-mendeteksi-hiv-aids-di-kabupaten-cirebon>.
- “Upaya Pemkab Cirebon Dalam Pengendalian HIV/AIDS.” 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7667366/upaya-pemkab-cirebon-dalam-pengendalian-hiv-aids/amp>.
- Zaeni, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum* 6 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.102>.